



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
UNIT KERJA : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **FAJAR SRININGSIH**
2. Jabatan : **SEKRETARIS**
3. NHK : **551876**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.585.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 130 m2/130 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 1775 m2/1775 m2 di KAB / KOTA KLATEN, WARISAN Rp. 80.000.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 470 m2/470 m2 di KAB / KOTA KLATEN, WARISAN Rp. 1.000.000.000		
4. Tanah dan Bangunan Seluas 1730 m2/1730 m2 di KAB / KOTA KLATEN, WARISAN Rp. 120.000.000		
5. Tanah dan Bangunan Seluas 25 m2/40 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 185.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	202.500.000
1. MOBIL, DAIHATSU TERIOS 1.5 R M/T / MINIBUS Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 192.500.000		
2. MOTOR, HONDA F1C02N46LO A/T Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	3.574.964
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.791.074.964



III. HUTANG

Rp.

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

1.791.074.964

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggali Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
UNIT KERJA : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

I. DATA PRIBADI

- Nama** : MUHAMAD KATMA F DIRUN
- Jabatan** : KEPALA BADAN
- NHK** : 405996

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	750.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 266 m2/247 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000		
2. Tanah Seluas 2499 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	---
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	15.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.371.618.826
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	2.136.618.826
III. HUTANG	Rp.	82.550.077
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.054.068.749

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
UNIT KERJA : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

I. DATA PRIBADI

- Nama** : KRISTINA VITA
- Jabatan** : BENDAHARA
- NHK** : 974896

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	----
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	122.000.000
1. MOBIL, TOYOTA AGYA 1,2 G A/T STD Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000		
2. MOTOR, HONDA D1A02N19W1 A/T Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000		
3. MOTOR, HONDA NC11B3CA/T Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	15.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	137.000.000
III. HUTANG	Rp.	120.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	17.000.000

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan



Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
UNIT KERJA : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

I. DATA PRIBADI

1. Nama : YOHANNI EVELINE JOHANNIS
2. Jabatan : ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
3. NHK : 915707

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	800.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 18 m2/16 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000		
2. Tanah Seluas 600 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA , LAINNYA Rp. 100.000.000		
3. Tanah Seluas 600 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA , LAINNYA Rp. 100.000.000		
4. Tanah Seluas 600 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA , LAINNYA Rp. 100.000.000		
5. Tanah Seluas 1800 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA , LAINNYA Rp. 200.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	108.000.000
1. MOTOR, HONDA REVO BEBEK -- REVO Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000		
2. MOBIL, TOYOTA AVANZA - Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	15.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	20.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	943.000.000



III. HUTANG

Rp. 50.360.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 892.640.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.